

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA**

Skripsi

Oleh

**KHALIMATUS SAADAH
NPM 2211031132**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA**

Oleh

KHALIMATUS SAADAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA

Oleh

KHALIMATUS SAADAH

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana ukuran pemerintah, tingkat kemandirian, dan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhubungan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Badan Pusat statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan *website* resmi pemerintah daerah merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam analisis kuantitatif ini. Purposive sampling dipakai sebagai metode untuk menentukan sampel dan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menginterpretasikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah dipengaruhi oleh opini audit BPK. Di sisi lain, tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah tidak secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran pemerintah atau tingkat kemandirian. Temuan ini menunjukkan bahwa opini audit BPK memiliki peran penting dalam mendorong pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit yang lebih baik cenderung lebih terbuka dalam menyajikan informasi keuangan kepada publik.

Kata Kunci: Laporan Keuangan; Pengungkapan Laporan Keuangan; Pemerintah Daerah; Transparansi; *Website*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS ON THE LEVEL OF FINANCIAL STATEMENT DISCLOSURE ON LOCAL GOVERNMENT WEBSITES ACROSS SUMATRA

By

Khalimatus Saadah

The purpose of this study is to examine how government size, independence level, and the audit opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) are related to the level of financial report disclosure on local government websites. The Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Home Affairs, and official local government websites served as secondary data sources used in this quantitative analysis. Purposive sampling was used to determine the sample, and multiple linear regression analysis was used to interpret the data. The results indicate that the level of financial report disclosure on local government websites is influenced by the BPK audit opinion. Conversely, the level of financial report disclosure on local government websites is not significantly affected by government size or independence level. These findings indicate that the quality of external audit results plays a crucial role in promoting transparency in regional financial management through online media. Local governments that receive better audit opinions tend to be more transparent in presenting financial information to the public.

Keywords: *Financial Report Disclosure; Financial Report; Local Government; Transparency; Website.*

Judul Skripsi

: Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Website Pemerintah Daerah Se-Sumatera

Nama Mahasiswa

: Khalimatus Saadah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2211031132

Program Studi

: SI Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Dr. Saifing Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.

NIP. 197403122001121003

2. Ketua Jurusan Akuntansi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agrianti'.

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.

NIP. 197008011995122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.

Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.

Anggota : Niken Kusumawardhani, S.E., M.Sc. Ak., CA.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 April 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khalimatus Saadah

NPM : 2211031132

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di *Website* Pemerintah Daerah Se-Sumatera**" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa Memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 April 2026

Yang menyatakan



Khalimatus Saadah

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Khalimatus Saadah, lahir di Kota Agung pada 26 Juni 2004.
Penulis menempuh pendidikan di tingkat SD, MTS, dan MA sebelum melanjutkan studi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di *Website* Pemerintah Daerah Se-Sumatera” ini. Tanpa pertolongan dan izinnya, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Orang Tuaku: Mamak dan Bapak

Terima kasih penulis ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti.

Keluargaku

Terima kasih penulis ucapkan dari hati yang paling dalam kepada keluarga terkasih.

MOTTO

Whatever happens, happens.

Aku yakin pertolongan Allah adalah **nyata**.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di *Website* Pemerintah Daerah Se-Sumatera” ini. Tanpa pertolongan dan izinnya, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat kekuatan, kesabaran, serta kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, penulis mampu melewati setiap proses tersebut hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., AKT., CA selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.CA selaku dosen pembimbing penulis. Karena berkat bimbingan, saran, dan juga arahan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih banyak sudah menjadi dosen pembimbing yang membimbing mahasiswanya dengan sangat baik, menjadi salah satu mahasiswa yang dibimbing langsung oleh beliau

merupakan sebuah kemurahan takdir dan anugerah yang senantiasa penulis syukuri.

5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembahas I. Karena berkat bimbingan, saran, dan juga arahan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc selaku dosen pembahas II. Karena berkat bimbingan, saran, dan juga arahan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas ilmu, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan.
8. Bapak, ayahanda tercinta. Sosok yang senantiasa dengan sabar dan tanpa lelah membimbing penulis dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Terima kasih atas setiap nasihat, arahan, dan nilai kehidupan yang telah bapak tanamkan sejak penulis kecil hingga saat ini. Ilmu dan pelajaran hidup yang bapak berikan menjadi bekal yang sangat berharga dan tidak akan pernah habis sepanjang perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas doa dan ridho yang selalu bapak panjatkan, yang menjadi kekuatan bagi penulis hingga mampu berada di titik ini. Dukungan, ketegasan, serta kasih sayang yang bapak berikan telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan berani melangkah dalam menghadapi setiap tantangan.
9. Mamak, ibunda penulis yang sangat penulis sayangi. Sosok perempuan hebat yang hatinya seluas samudera, yang kasih sayangnya tak pernah putus dan selalu mengalir dalam setiap langkah kehidupan penulis. Ibunda yang tak kenal lelah berjuang demi menghidupi penulis, mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaannya tanpa pernah mengeluh. Panasnya terik matahari tak pernah beliau hiraukan, demi memastikan penulis dapat hidup dengan cukup serta memperoleh pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Setiap doa yang beliau panjatkan, setiap keringat yang beliau teteskan, menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan bertahan dalam setiap proses kehidupan.
10. Nurhadi, kakak laki-laki penulis namun perannya bukan hanya sebagai kakak, tapi juga sebagai penunjuk arah terhadap masa depan penulis. sosok yang

pertama kali muncul di kepala ketika penulis butuh bantuan dan juga arahan. Beliau adalah sosok yang ada di balik penulis untuk melanjutkan studi di sini, di Universitas Lampung. Tanpa beliau tidak akan ada Khalimatus Saadah dengan pendidikan tinggi, tidak ada penulis dengan gelar sarjana akuntansi. Melanjutkan studi ke perguruan tinggi tidak pernah terpikirkan oleh penulis saat penulis sedang menempuh Sekolah Menengah Atas, tapi beliau, Nurhadi mendorong, meyakinkan bahkan memfasilitasi penulis untuk melanjutkan studi. Beliau sangat bertanggungjawab terhadap pendidikan penulis yang bahkan sebenarnya bukan tanggung jawabnya, terima kasih penulis ucapkan dari hati yang paling dalam kepada Nurhadi atas semua bantuan dan arahan yang diberikan kepada penulis. Mari terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Hidup damai, kaya dan bahagia, Mas.

11. Ahmad Zaini, kakak laki-laki penulis yang telah memberikan begitu banyak bantuan dan dukungan sejak awal perjalanan studi penulis. Beliau merupakan sosok yang pertama kali mengantarkan penulis menginjakkan kaki di Universitas Lampung, menjadi bagian dari langkah awal yang sangat berarti dalam perjalanan pendidikan penulis.
12. Umi Habibah dan seluruh keluarga penulis atas bantuan, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Putri Halimatussya'diah dan Shintya Anggita Putri, sahabat penulis. Bersama mereka, hal yang sulit menjadi mudah, hal yang berat menjadi ringan. Terima kasih sudah membersamai penulis, terima kasih sudah menjadi sandaran dan ruang aman untuk penulis berbagi cerita. Bersama mereka, menempuh pendidikan di Universitas Lampung menjadi lebih menyenangkan. Ayo tumbuh dan berkembang hingga menjadi orang kaya, damai dan bahagia di masa depan.
14. Melsa Amrina, sahabat penulis. Amrina adalah orang pertama yang penulis kenal di tanah rantau ini. Bersama Amrina, penulis tidak pernah merasa sendiri. Bersama Amrina, penulis dapat menjadi diri sendiri. Terima kasih sudah menjadi *roommate* yang menyenangkan. Ayo tumbuh dan berkembang hingga menjadi orang kaya, damai dan bahagia di masa depan.

15. Enhypen, salah satu tempat penulis untuk pulang. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat di setiap langkah penulis yang terasa berat. Melalui lagu, tawa, dan perjalanan kalian, penulis belajar untuk terus bertahan, bermimpi, dan percaya pada diri sendiri. Tolong tetap bersinar sebagai Enhypen, hingga suatu hari penulis diberi kesempatan untuk bertemu.
16. VVUP, salah satu tempat penulis untuk pulang. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Melalui lagu, semangat, perjalanan dan kehangatan yang kalian hadirkan, penulis belajar untuk tetap bertahan dan percaya bahwa setiap proses memiliki makna. Tolong tetap bersinar sebagai VVUP, hingga suatu hari penulis diberi kesempatan untuk bertemu.
17. Kepada penulis, Khalimatus Saadah. Terima kasih.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Agensi.....	10
2.2 Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	12
2.3 Informasi Keuangan Daerah.....	13
2.4 Karakteristik Pemerintah	14
2.4.1 Ukuran Pemerintah	15
2.4.2 Tingkat Kemandirian	16
2.4.3 Opini Audit BPK	17
2.5 Variabel Kontrol.....	18
2.5.1 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	18
2.6 Penelitian Terdahulu.....	19
2.7 Kerangka Penelitian	23
2.8 Hipotesis Penelitian	23
2.8.1 Ukuran Pemerintah	23
2.8.2 Tingkat Kemandirian	24
2.8.3 Opini Audit BPK	25
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.2 Sumber Data Penelitian	27

3.3 Definisi Operasional Variabel	28
3.3.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada <i>Website</i> Pemda.....	28
3.3.2 Karakteristik Pemerintah	30
3.4 Variabel Kontrol.....	32
3.4.1 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	32
3.5 Metode Analisis Data	32
3.5.1 Statistik Deskriptif	32
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.5.3 Variabel Dummy pada Model Regresi	34
3.6 Pengujian Hipotesis	35
IV. PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Populasi dan Sampel.....	37
4.1.2 Analisis Statistik Dreskriptif.....	38
4.2 Uji Asumsi Klasik	40
4.2.1 Uji Normalitas.....	40
4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas	42
4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	42
4.3 Analisis Regresi.....	43
4.3.1 Uji Regresi Linear Berganda	43
4.3.2 Uji Koefisien Determinasi	45
4.4 Pengujian Hipotesis	46
4.4.1 Uji Statistik t	46
4.4.2 Uji Statistik F.....	48
4.5. Pembahasan	50
4.5.1. Ukuran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	50
4.5.2 Tingkat Kemandirian Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	52
4.5.3. Opini Audit BPK Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di <i>Website</i> Pemerintah Daerah	54
V. SIMPULAN DAN SARAN	56

5.1 Simpulan.....	56
5.2 Keterbatasan Penelitian	57
5.3 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Indikator Tingkat Pendidikan Kepala Daerah.....	32
Tabel 4.1.Prosedur Pemilihan Sampel	37
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	38
Tabel 4.3 Hasi Uji Normalitas	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	44
Tabel 4.6 pengujian Koefisien Determinasi.....	45
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	46
Tabel 4.8 Hasil Uji f.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skor Transparansi Anggaran Indonesia	2
Gambar 1.2 Diagram Fluktuatif Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3
Gambar 1.3 Diagram Pengungkapan Laporan Keuangan Pemeritah Daerah Pulau Sumatera di <i>Website</i> Pemda	4
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas	43

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pada Pasal 7 Ayat (2), (3), dan (6) ditegaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta membangun sistem informasi dan dokumentasi yang efisien agar informasi publik dapat diakses dengan mudah, termasuk melalui pemanfaatan sarana elektronik maupun nonelektronik. UU No. 14 Tahun 2008 tidak secara eksplisit menetapkan metode penyampaian informasi keuangan pemerintah melalui media tertentu, seperti *website*. Namun, merujuk pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government”.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui *website* pada dasarnya masih bersifat sukarela melihat UU No. 14 Tahun 2008. Namun, dalam rangka mendukung pelaksanaan e-government menurut Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, pemanfaatan *website* pemerintah daerah sebagai sarana pengungkapan laporan keuangan menjadi langkah penting dalam menyampaikan informasi secara modern, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah (pemda) merupakan elemen penting dalam *good governance*. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan

dapat dipercaya oleh publik. Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 214 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemda wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat”, serta ayat (4) yang mengatur bahwa “Informasi keuangan daerah (informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri”. Ketentuan tersebut mengindikasikan pengungkapan laporan keuangan pemda memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus berfungsi sebagai sarana meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2023, Berdasarkan hasil *Open Budget Survey (OBS) 2023* yang dirilis oleh *International Budget Partnership*, Indonesia memperoleh skor transparansi anggaran sebesar 70 dari 100. Capaian ini juga menempatkan Indonesia pada peringkat 20 dari 125 negara yang disurvei serta jauh berada di atas rata-rata skor transparansi global sebesar 45 poin, sehingga mengindikasikan kemajuan yang signifikan dalam keterbukaan pengelolaan anggaran pemerintah.

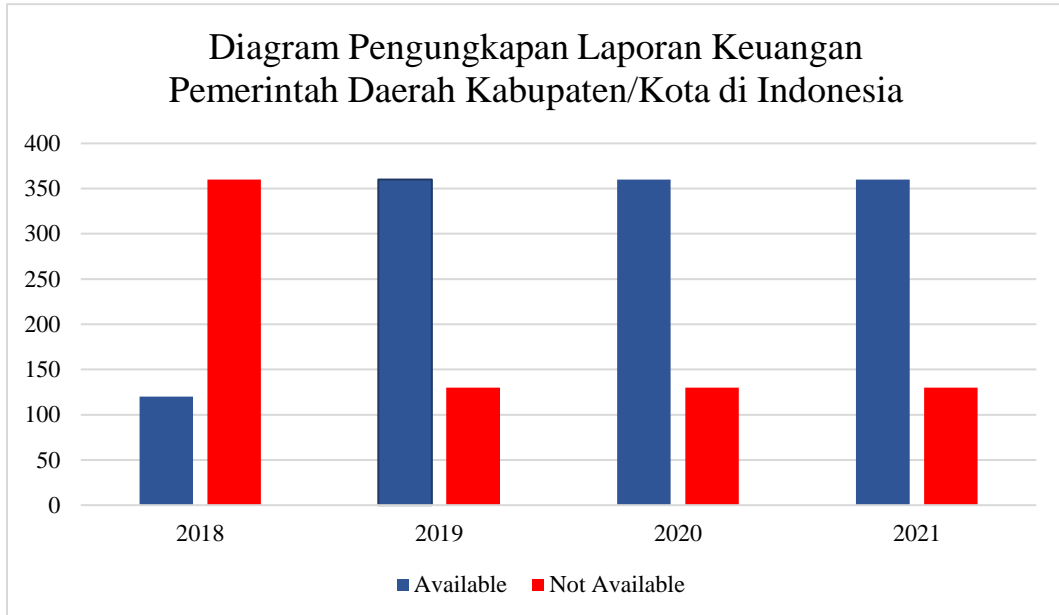


Gambar 1.1 Skor Transparansi Anggaran Indonesia

(Sumber: OBS 2023)

Berdasarkan skor transparansi anggaran Indonesia yang mencapai 70 poin dalam OBS 2023, yang menunjukkan tingkat keterbukaan informasi keuangan yang

sudah memadai di tingkat pemerintah pusat, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada pemerintah daerah, karena pengungkapan laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota masih belum diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

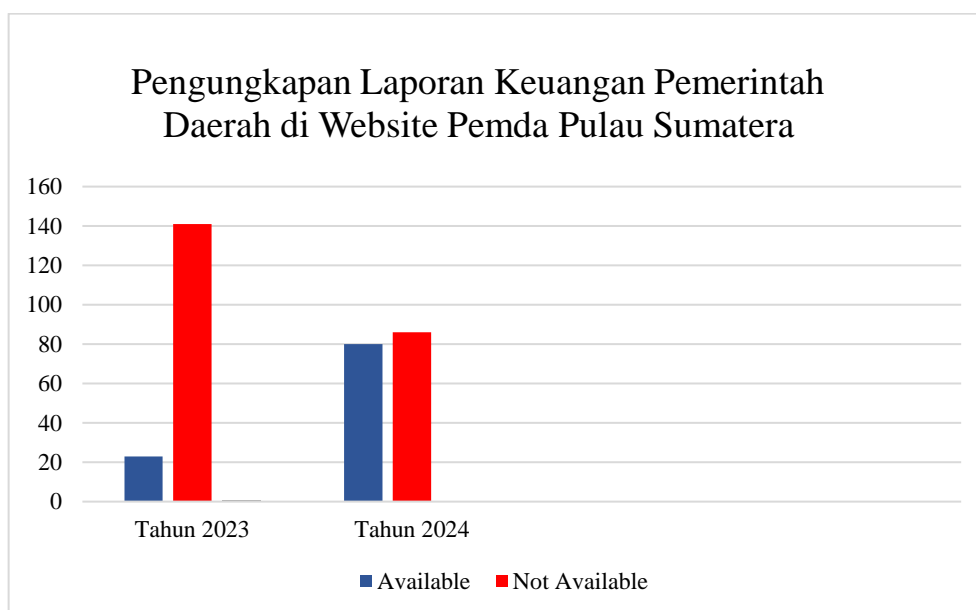


**Gambar 1.2 Diagram Fluktuatif Pengungkapan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.**

(Sumber: Putra et al., 2023)

Berdasarkan diagram fluktuatif pengungkapan laporan keuangan yang disusun oleh (Putra et al., 2023) menunjukkan implementasi pengungkapan laporan keuangan melalui *website* pemda masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait konsistensi pelaksanaannya. Data pada periode 2018 hingga 2021 memperlihatkan bahwa sejumlah pemerintah daerah tidak secara berkelanjutan mengungkapkan laporannya melalui *website*, bahkan pada 2018 jumlah pemda yang tidak mengungkapkan laporan keuangan melalui *website* tercatat lebih banyak dibandingkan yang telah mengungkapkannya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan *website* sebagai sarana pengungkapan laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah masih belum optimal dan perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian (Putra et al., 2023), pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui *website* di Indonesia mengindikasikan adanya peningkatan, yaitu dari rata-rata sekitar 23% pada tahun 2018 menjadi sekitar 72% pada periode 2019–2021. Temuan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan dalam praktik pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda secara nasional. Namun demikian, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan keadaan di tingkat regional.



Gambar 1.3 Diagram Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Sumatera di *Website* Pemda
(Sumber: Diolah penulis, 2025)

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, data tahun 2023 menunjukkan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap oleh pemerintah daerah di Pulau Sumatera berada pada kisaran 14% yang mana lebih rendah dibandingkan capaian nasional pada periode sebelumnya. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan secara lengkap di *website* pemda pulau Sumatera berada pada kisaran 48% yang mana lebih rendah dibandingkan capaian nasional pada periode sebelumnya. Perbedaan kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda di seluruh Indonesia dan tingkat pengungkapan laporan

keuangan di *website* pemda di pulau Sumatera. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda, khususnya di Pulau Sumatera, menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran empiris yang lebih spesifik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Fenomena rendahnya tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda di Pulau Sumatera pada tahun 2023 dan 2024, jika dibandingkan dengan tingkat pengungkapan pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada periode 2018–2021, menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda di Pulau Sumatera.

Secara normatif, pengungkapan laporan keuangan pemda seharusnya dilakukan secara terbuka, mudah diakses, dan informatif bagi masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini telah diamanatkan dalam PP No.12 Tahun 2019 Pasal 214 menegaskan bahwa informasi keuangan daerah wajib diumumkan dan harus mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, *website* resmi pemda seharusnya menjadi media utama untuk menyebarkan laporan keuangan secara cepat, luas, dan tanpa hambatan geografis.

Meskipun secara nasional Indonesia telah mencapai tingkat transparansi anggaran yang memadai, implementasinya pada level pemerintah daerah khususnya pada pemerintah daerah di pulau Sumatera belum merata dan masih menunjukkan ketidakkonsistenan seperti yang ditunjukkan dalam penelitian (Putra et al., 2023) pada periode 2018–2021. Namun, kajian yang secara spesifik menilai pengungkapan laporan keuangan melalui *website* pada pemda di Pulau Sumatera masih terbatas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemerintah daerah di Pulau Sumatera telah menggunakan *website* sebagai media Pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian terkait pengungkapan laporan keuangan di wilayah Sumatera sebenarnya sudah ada, namun cakupannya masih terbatas pada daerah atau provinsi tertentu saja, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh untuk satu pulau secara keseluruhan. Padahal, Sumatera terdiri dari banyak provinsi dan kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kapasitas birokrasi yang berbeda-beda. Dengan ruang lingkup penelitian yang masih parsial, belum ada kajian yang mampu memotret secara keseluruhan bagaimana implementasi pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda pulau Sumatera. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperluas jangkauan analisis, sekaligus mengisi kekosongan literatur yang ada dengan memberikan gambaran lebih utuh mengenai pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda se-Sumatera.

Penelitian tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda sudah diteliti oleh beberapa peneliti, salah satunya yaitu Indaryani & Rahayu (2021) dengan fokus pada pemda di Pulau Kalimantan periode 2019-2020. Namun, hasil penelitian tersebut belum bisa digeneralisasi pada wilayah lain, khususnya pada pulau Sumatera.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak sama terkait pengaruh ukuran pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda. Penelitian (Rahayu & Khasanah, 2022; Yuniarta & Purnamawati, 2020; Utomo & Aryani, 2016; Yanuaraisya, 2016) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda, sedangkan penelitian (Chairani et al., 2021; Kurniawati et al., 2020; Adiputra et al., 2018) menemukan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda.

Penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda terkait pengaruh ukuran tingkat kemandirian terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda. Penelitian (Indaryani & Rahayu, 2023; Yuniarta & Purnamawati, 2020; Rahim et al., 2020) menemukan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda, sedangkan penelitian (Dewi & Purwanto, 2022; Chairani et al., 2021) menemukan

bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh opini audit BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda.

Penelitian (Nor et al., 2019; Adiputra et al., 2018) menemukan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda, sedangkan penelitian (Yuniarta & Purnamawati, 2020; Utomo & Aryani, 2016) menemukan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda.

Ditemukan kesenjangan penelitian yang dapat dilihat dari perbedaan wilayah penelitian, perbedaan periode pengamatan, serta adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dilakukan pada cakupan wilayah dan rentang waktu yang berbeda-beda serta menunjukkan temuan yang tidak konsisten terkait pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kemandirian dan opini audit BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti pemerintah daerah di Pulau Sumatera pada periode 2023–2024.

Penelitian ini berfokus pada pemda yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Pemilihan Pulau Sumatera dilakukan karena wilayah ini memiliki jumlah pemerintah daerah yang cukup banyak dan terdiri dari berbagai karakteristik ekonomi, geografis, serta tingkat pembangunan yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait pengungkapan laporan keuangan di *website* pada tingkat daerah. Selain itu, berdasarkan penelusuran penulis, seluruh pemda di Pulau Sumatera telah memiliki *website* resmi sebagai sarana penyampaian informasi publik. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran secara langsung terhadap ketersediaan laporan keuangan yang diunggah melalui *website* pemerintah daerah, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih efektif dan objektif dalam mengevaluasi penerapan keterbukaan informasi keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, dengan demikian masalah pada penelitian dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda?
2. Apakah tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda?
3. Apakah opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda.
2. Memperoleh bukti empiris bahwa tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda.
3. Memperoleh bukti empiris bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan akademis mengenai peran variabel ukuran pemerintah, tingkat kemandirian dan opini audit BPK dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi informasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pemda Pulau Sumatera sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda.
- 2) Bagi BPK dan pihak terkait lainnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menilai sejauh mana hasil audit dan karakteristik pemerintah daerah berdampak pada keterbukaan informasi publik.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya, temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi serta dasar pengembangan riset terkait pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda dengan mempertimbangkan variabel lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemberi amanah (*principal*) dengan pihak penerima amanah (*agent*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling , 1976) mendefinisikan “hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan”. Namun, karena agent mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan principal, sering muncul asimetri informasi yang memicu konflik kepentingan. Kondisi ini menyebabkan principal harus mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) untuk memastikan agent bertindak sesuai kepentingannya, yang kemudian dikenal sebagai biaya keagenan (*agency cost*).

Dalam konteks sektor publik, masyarakat dapat dipandang sebagai *principal* yang memberikan mandat pada pemda (*agent*) untuk mengelola sumber daya publik. Namun, pemerintah sebagai agent berpotensi mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat, misalnya dengan memprioritaskan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring agar perilaku pemerintah tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan masyarakat.

Salah satu bentuk monitoring yang relevan yaitu melakukan pengungkapan laporan keuangan secara transparan. Melalui pengungkapan LKPD di *website* pemda atau *Internet Financial Reporting* (IFR), masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran daerah secara lebih terbuka dan mengurangi asimetri informasi

Tugas pemerintah daerah sebagai organisasi yang mewakili masyarakat adalah memberikan laporan kepada masyarakat tentang hasil dari kegiatan pemerintahan yang sudah dilakukan (Wulandari & Sulistyowati, 2024). “Hasil pelaksanaan pemerintahan terkait dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat sebagai prinsipal adalah dalam bentuk laporan keuangan” (Putra & Syofyan, 2020).

Teori agensi mengemukakan bahwa pengungkapan informasi keuangan adalah bentuk tanggung jawab *agent* kepada *principal*. Semakin lengkap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda, maka semakin kecil pemda bertindak untuk kepentingan sendiri. Pengungkapan laporan keuangan di *website* juga berfungsi sebagai sarana pengawasan oleh masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengungkapan laporan keuangan tersebut, konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat diminimalkan serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat. Oleh sebab itu, teori agensi tepat digunakan sebagai dasar teori untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi pengungkapan LKPD di *website* pemda.

Pemda berukuran besar umumnya mengelola aset, anggaran, dan program pelayanan publik yang lebih kompleks. Kompleksitas tersebut meningkatkan potensi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, sehingga tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas juga semakin tinggi. Dalam perspektif teori agensi, untuk mengurangi konflik kepentingan dan menekan biaya pengawasan, pemerintah daerah berukuran besar cenderung terdorong melakukan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda.

Tingkat kemandirian suatu pemda mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan operasionalnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah tanpa adanya ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Dalam perspektif teori agensi, semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini mendorong pemda untuk melaksanakan pengungkapan laporan keuangan di *website* guna mengurangi asimetri informasi.

Opini audit BPK adalah penilaian independen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit yang menunjukkan kualitas tinggi, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi sinyal positif dari *agent* kepada *principal* bahwa pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan berdasarkan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka teori agensi, pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit yang baik memiliki dorongan untuk mengungkapkan laporan keuangan di *website* sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya membangun kepercayaan publik. Berbeda halnya, opini audit yang kurang baik bisa meningkatkan kecenderungan *agent* untuk tidak melaksanakan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda.

Dengan demikian, teori agensi mampu menjelaskan bagaimana ukuran pemerintah, tingkat kemandirian serta opini audit BPK berperan dalam memengaruhi pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda sebagai cara untuk meminimalisir asimetri informasi dan konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

2.2 Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Transparansi serta akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen (UNDP, 1997) bahwa *good governance* harus bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban kepada publik atas semua tindakan pemerintah. Selanjutnya, (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan transparansi sebagai kesediaan pemerintah untuk menyediakan informasi tentang bagaimana sumber daya publik dikelola kepada pihak yang membutuhkannya.

Penegasan terkait kedua prinsip ini juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 Kerangka Konseptual (hal. 7), yang menyatakan bahwa “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, transparansi membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik, sedangkan akuntabilitas menekankan kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan maupun penggunaan sumber daya publik. Kedua prinsip ini saling melengkapi; tanpa transparansi akuntabilitas sulit diwujudkan, dan tanpa akuntabilitas transparansi tidak memiliki makna substantif.

2.3 Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan daerah dan mengumumkannya terhadap masyarakat, seperti yang sudah diamanatkan pada PP No.12 tahun 2019. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pengelolaan keuangan daerah secara transparan. Informasi penganggaran, laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran harus termuat dalam informasi keuangan daerah. Informasi penganggaran mencakup rencana penggunaan anggaran daerah, pelaksanaan anggaran mencakup realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah, sedangkan laporan keuangan merupakan rekapitulasi kondisi keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik dan menilai akuntabilitas (Nugraha et al., 2026).

Informasi keuangan daerah digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain:

- a. Membantu Kepala Daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah agar anggaran dapat direncanakan secara tepat dan penggunaan dana lebih efisien.

- b. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan keuangan daerah sehingga keputusan mengenai alokasi dana dan prioritas pembangunan dapat dibuat berdasarkan data yang akurat.
- c. Membantu Kepala Daerah melaksanakan evaluasi kinerja keuangan daerah sehingga pelaksanaan anggaran dapat dipantau dan langkah perbaikan dapat dilakukan bila diperlukan.
- d. Menyediakan statistik keuangan daerah yang memudahkan analisis dan perbandingan kinerja keuangan antar periode atau antar daerah.
- e. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat agar publik dapat memantau pengelolaan keuangan daerah dan mendorong akuntabilitas pemerintah.
- f. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah sehingga pengelolaan anggaran serta laporan keuangan menjadi lebih efisien serta transparan.
- g. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah agar efektivitas penggunaan anggaran, pencapaian target, dan kepatuhan terhadap peraturan dapat diukur secara menyeluruh.

Masyarakat harus memiliki akses mudah terhadap informasi keuangan daerah dan harus diberikan pada menteri dan para menteri yang mengawasi kegiatan pemerintah di bidang keuangan. Penyediaan serta pengumuman informasi keuangan daerah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemda. Dengan informasi lengkap dan mudah diakses, masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan daerah, sementara Kepala Daerah dapat menggunakan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan.

2.4 Karakteristik Pemerintah

Menurut Aulia (2017) dalam (Pradana et.al., 2022) karakteristik pemerintah daerah dipahami sebagai ciri khas yang melekat pada suatu daerah dan digunakan sebagai pembeda dengan daerah lainnya. Ukuran pemerintah, tingkat kemandirian, dan opini audit BPK merupakan 3 karakteristik pemerintah dalam penelitian ini

2.4.1 Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah termasuk salah satu variabel penting yang sering digunakan dalam penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sejumlah peneliti memberikan definisi yang berbeda mengenai ukuran pemerintah, namun secara umum merujuk pada skala besar kecilnya entitas pemerintah yang tercermin melalui aset, pendapatan, maupun belanja daerah. (Adiputra et al., 2018) menyebut bahwa ukuran pemerintah daerah bisa tercermin dari besarnya aset yang tercantum dalam laporan keuangan.

Ukuran pemerintah tetap menjadi variabel yang relevan karena semakin besar suatu pemerintah daerah, semakin kompleks pula pengelolaan keuangannya dan semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap transparansi informasi publik. Dalam penelitian ini, total aset digunakan sebagai proksi dari ukuran pemerintah. Total aset mencerminkan kapasitas ekonomi serta luasnya tanggung jawab pengelolaan sumber daya daerah. Oleh sebab itu, pemda yang memiliki jumlah aset yang besar cenderung memiliki kemampuan dan dorongan lebih kuat untuk mengungkapkan laporan keuangan secara terbuka melalui *website* resmi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Berdasarkan teori agensi, semakin besar ukuran pemerintah maka asimetri informasi antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) semakin tinggi, sehingga pemerintah terdorong untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan di *website* guna menurunkan potensi konflik kepentingan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini terdukung oleh penelitian (Rahayu & Khasanah, 2022) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan melalui internet pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2020.

(Sari & Mustanda, 2019) dalam penelitiannya mengungkapkan ukuran pemerintah dapat diukur melalui keseluruhan aset pemerintah daerah. Semakin besar aset, semakin besar pula skala pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Pendekatan ini menekankan bahwa kekuatan fiskal suatu daerah sangat tercermin dari jumlah aset yang dikelolanya.

Selanjutnya, (Kurniawati et al., 2020) dalam studinya, ia memakai jumlah aset pemerintah daerah sebagai proksi ukuran pemerintah. Karena aset adalah sumber daya keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, total aset digunakan sebagai proksi ukuran pemerintah daerah.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa ukuran pemerintah bukan hanya mencerminkan kapasitas fiskal daerah, namun juga memengaruhi seberapa besar kemampuan pemda dalam mewujudkan transparansi keuangan. Pemerintah berukuran besar diharapkan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas publik yang lebih tinggi melalui pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka.

2.4.2 Tingkat Kemandirian

Beberapa peneliti memberikan definisi yang berbeda mengenai tingkat kemandirian, namun secara umum mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran dan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri tanpa terlalu bergantung terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian berperan penting dalam menentukan sejauh mana pemda bersedia mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi yang diukur menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat sebagai pihak yang menjadi sumber utama penerimaan daerah. Kondisi ini mendorong pemda untuk memperkuat akuntabilitasnya dengan mengungkapkan laporan keuangan yang lengkap dan mudah diakses publik melalui *website* resmi. Berdasarkan teori keagenan, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin besar juga dorongan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik secara transparan kepada masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian (Indaryani & Rahayu, 2023) yang menunjukkan tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah

(Indaryani & Rahayu, 2023) di dalam penelitiannya tingkat kemandirian pemda diukur menggunakan rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah. (Rahim et.al., 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kemandirian dapat dipandang sebagai kebalikan dari ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin rendah ketergantungan pemda terhadap dana transfer pusat untuk membiayai operasional dan pembangunan.

Menurut penelitian (Chairani et al., 2021), rasio PAD terhadap jumlah pendapatan daerah digunakan sebagai proksi tingkat kemandirian. Informasi PAD didapat dari LKPD yang sudah diaudit BPK. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, karena mengindikasikan kapasitas daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri tanpa bergantung terhadap transfer dari pemerintah pusat.

2.4.3 Opini Audit BPK

Salah satu instrumen penting untuk mengevaluasi kualitas LKPD adalah opini audit BPK. Opini audit ditentukan berdasarkan hasil audit BPK mengenai kepatuhan laporan keuangan terhadap persyaratan hukum dan peraturan serta standar akuntansi. Bentuk opini yang diberikan antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini audit BPK menjadi sinyal bagi masyarakat serta pemangku kepentingan tentang sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipercaya dan akuntabel.

Pada penelitian (Adiputra et al., 2018), opini audit BPK terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi. Pemda yang mendapatkan opini WTP cenderung lebih terdorong menampilkan LKPD secara terbuka pada *website* resmi mereka. Hal ini bisa dimaknai bahwa opini audit bukan sekadar penilaian teknis, tetapi juga memiliki implikasi reputasi yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban publik.

2.5 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dijaga tetap konstan atau dikelola untuk mencegah faktor eksternal yang tidak diteliti memengaruhi dampak variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2023). Tingkat pendidikan kepala daerah merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini.

2.5.1 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang sudah diselesaikan oleh kepala daerah (Pahlevi & Setiawan, 2017). Karena tingkat pendidikan seseorang mencerminkan pengetahuan dan kemampuan mendasar mereka, maka mereka yang memiliki latar belakang pendidikan formal memiliki informasi yang semakin kompleks (Pratiwi & Aryani, 2016). Transparansi informasi publik pemerintah daerah meningkat seiring dengan tingkat pendidikan kepala daerah. (Putri, 2023). Kepala daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpotensi mempunyai pemahaman yang lebih bagus mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah, sehingga bisa memengaruhi kebijakan terkait penyediaan informasi keuangan kepada publik, termasuk pengungkapan laporan keuangan di website pemda. Karena tingkat pendidikan seseorang mencerminkan pengetahuan dan kemampuan mendasar mereka, maka mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan formal memiliki informasi yang semakin kompleks.

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan kepala daerah digunakan sebagai variabel kontrol, yaitu variabel yang dijaga tetap konstan agar tidak memengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Data mengenai tingkat pendidikan kepala daerah diperoleh dari website resmi pemerintah daerah, khususnya pada bagian profil kepala daerah yang memuat informasi riwayat pendidikan. Informasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi jenjang pendidikan formal terakhir yang dijalani kepala daerah sebagai dasar pengukuran variabel dalam penelitian ini.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	I Made Pradana Adiputra, Sidharta Utama, dan Hilda Rossieta	<i>Transparency of local government in Indonesia</i>	<p>Variabel Terikat: <i>Transparency of local government in Indonesia</i></p> <p>Variabel Bebas: <i>The size of local government, the quality of local financial reports, the level of local government response to regulations, and the political environment.</i></p> <p>Metode Penelitian: Penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan analisis regresi berganda.</p>	<p>Berpengaruh positif: Ukuran pemerintah dan respon pemda</p> <p>Tidak berpengaruh: Kualitas laporan keuangan dan lingkungan politik</p>
2	Wahyudin Nor, Muhammad Hudaya & Rifqi Novriyandana	<i>Financial statements disclosure on Indonesian local government websites Aquest of its determinant(s)</i>	<p>Variabel Terikat: <i>Financial statements disclosure on local governments websites</i></p> <p>Variabel Bebas: <i>Audit opinion, audit findings, follow-up audit rec, educational level, welfare level, & heads of local governments commitment.</i></p> <p>Metode Penelitian:</p>	<p>Berpengaruh positif: Opini audit</p> <p>Tidak berpengaruh: Temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, tingkat Pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan komitmen kepala daerah.</p>

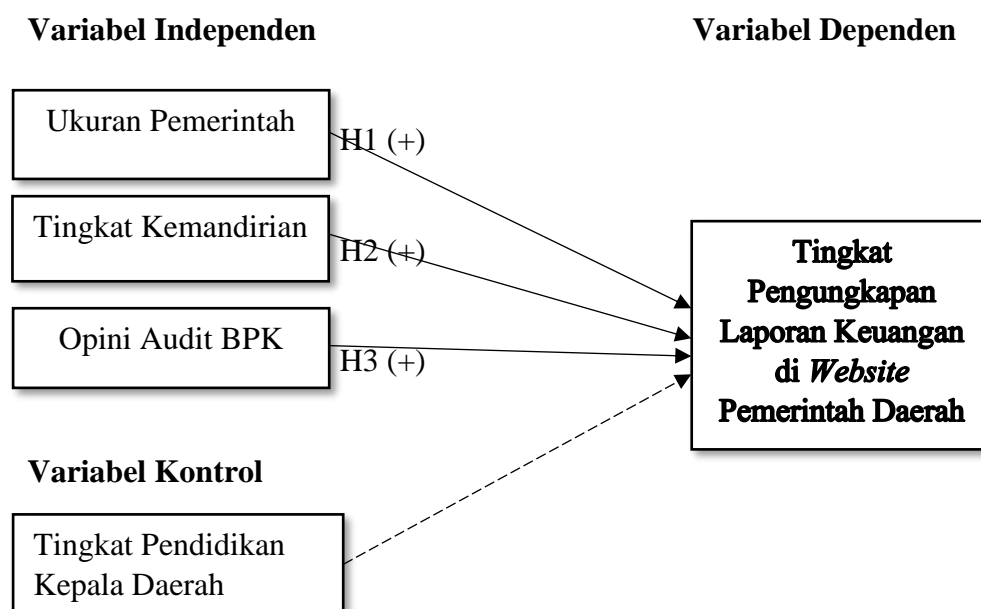
			<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian terdiri dari 68 laporan keuangan periode 2015–2016 yang dikumpulkan dari 34 pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan metode sensus.</p>	
3	Kurniawan Cahyo Utomo & Anni Aryani	<i>The Determinant of Financial Information Disclosure on Indonesian Lgs Website</i>	<p>Variabel Terikat: <i>Financial information disclosure on Indonesian lgs website.</i></p> <p>Variabel Bebas: <i>Size, leverage, wealth, audit opinion, liquidity & press visibility</i></p> <p>Metode Penelitian: Penelitian kuantitatif dengan metode analisis menggunakan regresi linier berganda</p>	<p>Berpengaruh positif: Ukuran pemerintah dan kekayaan daerah</p> <p>Tidak berpengaruh: <i>Leverage, audit opinion, liquidity & press visibility</i></p>
4	Ayu Yanuaraisya	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di <i>Website</i> Pemerintah	<p>Variabel Terikat: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di <i>Website</i> Pemerintah</p> <p>Variabel Bebas: Kekayaan daerah, ukuran pemerintah, dan jumlah penduduk.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian kuantitatif dengan</p>	<p>Berpengaruh positif: Ukuran pemerintah</p> <p>Tidak berpengaruh: Kekayaan daerah dan jumlah penduduk</p>

			teknik purposive sampling.	
5	Devita Kurniawati Aris Eddy Sarwono, dan Sunarti	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018)	Variabel Terikat: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Variabel Bebas: Ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah. Metode Penelitian: Metode sensus dengan data sekunder kuantitatif dan kualitatif.	Berpengaruh positif: Kekayaan daerah Tidak berpengaruh: Ukuran pemerintah
6	Aliffia Nur Indaryani & Sri Rahayu	Pengaruh Tingkat Kemandirian, Kesejahteraan Masyarakat dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan Tahun 2019-2020)	Variabel Terikat: Pengungkapan informasi keuangan pada <i>website</i> resmi pemerintah daerah Variabel Bebas: Tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kekayaan pemerintah daerah. Metode Penelitian: Penelitian kuantitatif dengan sampel Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan pada tahun 2019-2020, menggunakan model regresi logistik.	Berpengaruh positif: Tingkat kemandirian, kesejahteraan masyarakat, kekayaan pemerintah daerah Tidak berpengaruh: -
7	Adelina Chairani, Wahyudi Tertiaro	<i>Factors Affecting Disclosure of Financial</i>	Variabel Terikat: <i>Financial statements on local government</i>	Berpengaruh positif: <i>Total population</i>

	& Sari Rela	<i>Statements on Local Government Websites in Indonesia</i>	<i>websites in Indonesia</i> Variabel Bebas: <i>Political competition, size of local government, ratio of regional independence & total population.</i> Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif, yang menganalisis pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS.	Tidak berpengaruh: <i>Political competition, size of local government, ratio of regional independence.</i>
8	Gede Adi Yuniarta dan I Gusti Ayu Purnamaw ati	<i>Key elements of local government transparency in new public governance</i>	Variabel Terikat: <i>Implementation of internet financial local government reporting in Indonesia</i> Variabel Bebas: <i>Local government size, audit opinion & financial independence ratio</i> Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling melalui observasi <i>website</i> resmi pemerintah daerah.	Berpengaruh positif: Ukuran pemerintah dan rasio kemandirian Tidak berpengaruh: Opini audit

2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian disusun dengan merujuk pada perumusan masalah, latar belakang, tujuan penelitian, serta temuan-temuan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah sering dijadikan variabel penting dalam menilai pengungkapan laporan keuangan. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemerintah yang lebih besar cenderung lebih transparan karena tuntutan publik yang tinggi, sementara studi lain menunjukkan tidak selalu ada hubungan langsung, sebab transparansi juga dipengaruhi faktor manajerial dan komitmen pemerintah daerah. (Adiputra et al., 2018) menyebut ukuran pemerintah daerah tercermin dari besarnya aset yang tercantum dalam laporan keuangan.

Dalam penelitian (Rahayu & Khasanah, 2022; Yuniarta & Purnamawati, 2020; Utomo & Aryani, 2016; Yanuaraisya, 2016) menunjukkan ukuran

pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui *website*.

Dalam penelitian (Chairani et al., 2021;Kurniawati et al., 2020;Adiputra et al., 2018) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website*. Artinya, semakin besar ukuran pemerintah daerah, tidak selalu diikuti dengan peningkatan pengungkapan laporan keuangan pada *website* resmi.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya temuan yang tidak konsisten terkait hubungan ukuran pemerintah dan pengungkapan laporan keuangan. Beberapa studi menemukan semakin besar ukuran pemerintah akan membuat tingkat keterbukaan informasi keuangannya juga meningkat, sedangkan penelitian lain justru menyatakan sebaliknya, yaitu pemerintah daerah yang lebih besar cenderung tidak selalu transparan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah bukanlah faktor yang berdampak secara seragam pada seluruh wilayah, melainkan dapat dipengaruhi oleh kondisi dan juga karakteristik tertentu di masing-masing daerah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menguji kembali pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah se-Sumatera.

H1: Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah daerah.

2.8.2 Tingkat Kemandirian

Penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai hubungan tingkat kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah melalui *website* resmi. Penelitian (Indaryani & Rahayu, 2023;Yuniarta & Purnamawati, 2020;Rahim et.al., 2020) menunjukkan tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkap laporan keuangan melalui *website*. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin tinggi kemandirian suatu daerah dalam mendanai pengeluaran daerahnya sendiri, semakin besar juga dorongan pemerintah daerah

untuk menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan secara terbuka dan transparan di *website* resmi.

Dalam penelitian (Dewi & Purwanto, 2022; Chairani et.al., 2021) mendapatkan hasil tingkat kemandirian tidak ada pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda di Indonesia. Dengan demikian, besarnya tingkat kemandirian tidak selalu sejalan dengan peningkatan tingkat pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis tingkat kemandirian pemerintah daerah berpotensi memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam, di mana sebagian penelitian menemukan adanya pengaruh positif tingkat kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda, sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tidak berpengaruh signifikan.

H2: Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah daerah.

2.8.3 Opini Audit BPK

Opini audit BPK adalah salah satu instrumen penting untuk memberi penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit diberikan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap ketaatan pada peraturan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi.

Penelitian (Nor et al., 2019; Adiputra et al., 2018) menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati, 2020; Utomo & Aryani, 2016) mengindikasikan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website*.

Pemerintah daerah yang memperoleh opini dengan kualitas lebih baik, seperti WTP cenderung lebih terdorong untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui *website* resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Oleh sebab itu, opini audit bukan hanya sekadar menjadi penilaian teknis atas laporan keuangan, namun juga dapat menjadi sinyal bagi masyarakat terkait komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi.

Perbedaan kualitas opini audit yang diperoleh pemerintah daerah se-Sumatera memberikan ruang penelitian untuk menguji apakah opini audit BPK benar-benar berdampak pada tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* resmi pemerintah daerah.

H3: Opini audit BPK berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel, mengingat tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi. Populasi penelitian mencakup seluruh Pemerintah Daerah di pulau Sumatera (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki *website* resmi. Metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu dipakai untuk pemilihan sampel dalam penelitian, adapun kriteria yang digunakan adalah:

- a. Pemerintah daerah di Pulau Sumatera yang mempunyai *website* resmi dan dapat diakses.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemda dapat diakses jika laporan keuangan tidak tersedia dalam laman utama *website* pemda.
- c. Pemerintah Daerah yang menyediakan tautan untuk laporan keuangan dapat diakses (tidak mengalami error atau tautan tidak ditemukan)
- d. Pemerintah daerah di Pulau Sumatera (Provinsi/Kabupaten/Kota) melakukan pengungkapan laporan keuangan periode 2023-2024 di *website* resmi, dengan ketentuan sekurang-kurangnya mengungkapkan neraca dan laporan realisasi anggaran sebagai dasar pengukuran variabel independen.

3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari beberapa instansi resmi. Data mengenai pemerintah daerah, yang meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi jumlah pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian.

Data laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh pada *website* resmi masing-masing pemerintah daerah, khususnya laporan keuangan yang diungkapkan pada periode penelitian. Data ini dipakai untuk mengukur variabel pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Sementara itu, data hasil audit pemerintah daerah berupa opini audit didapat dari *website* data.bpk.go.id yang merupakan *website* resmi milik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Website* tersebut menyediakan informasi mengenai jenis opini audit atas LKPD, seperti WTP, WDP, Tidak Wajar, dan TMP. Data ini dipakai untuk mengukur variabel opini audit dalam penelitian, khususnya bagi pemerintah daerah yang belum mengungkapkan informasi opini audit pada *website* resmi pemda.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Website Pemda

Perez (2014) dalam (nor et al.,2019) menjelaskan pengungkapan LKPD pada *website* adalah pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan daring. “Selain sektor bisnis, sektor publik seperti pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet untuk menyampaikan informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan” (nor et al.,2019).

Pengungkapan LKPD di *website* pada dasarnya masih bersifat sukarela melihat UU No. 14 Tahun 2008. Namun, guna mendukung pelaksanaan e-government sejalan dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, pemanfaatan *website* pemerintah daerah sebagai sarana pengungkapan laporan keuangan menjadi langkah penting dalam menyampaikan informasi secara modern, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pengukuran tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda pada penelitian ini mengacu pada penelitian (García-Sánchez et al., 2013) yang menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dalam penelitiannya. Metode

ini dilakukan dengan cara menelusuri *website* pemda untuk memeriksa keberadaan item pengungkapan laporan keuangan, yang kemudian dinilai menggunakan skala biner yaitu nilai 1 apabila item laporan keuangan diungkapkan dan 0 apabila laporan keuangan tidak diungkapkan.

Menurut (Perez et al., 2005) informasi keuangan yang disediakan oleh pemda harus memenuhi karakteristik tertentu yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan lembaga pemerintah, yaitu kelengkapan informasi akuntansi, ketepatan waktu, kejelasan, keterbandingan, relevansi dan keandalan.

Kelengkapan informasi akuntansi berarti bahwa pengguna yang mengunjungi *website* pemda setidaknya harus memiliki akses terhadap informasi keuangan yang diwajibkan dan diperbolehkan secara hukum (Perez et al., 2005).

Di Indonesia, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), LKPD terdiri dari 7 item utama, sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Ketujuh item tersebut dipakai pada penelitian ini sebagai daftar ceklis pengungkapan laporan keuangan yang merepresentasikan item wajib pengungkapan sesuai dengan ketentuan SAP. Sesudah daftar ceklis disusun, tahap berikutnya adalah melakukan observasi langsung terhadap *website* resmi masing-masing pemerintah daerah. Setiap item dalam ceklis digunakan sebagai acuan untuk menilai ada atau tidaknya item laporan keuangan yang diungkapkan. Jika item laporan keuangan diungkapkan, diberikan nilai 1, sedangkan jika item laporan keuangan tidak diungkapkan, diberikan nilai 0. Tingkat pengungkapan kemudian dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai yang diperoleh tiap

pemerintah daerah dengan jumlah indikator yang ada dalam ceklis, yaitu sebanyak 7 item.

$$IP = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

IP = Indeks pengungkapan

$\sum X_{yi}$ = Nilai 0 = jika item y tidak diungkapkan, 1 = jika item y diungkapkan,

n_i = jumlah item untuk pengungkapan, $n_i \leq 7$.

Metode checklist berbasis skala biner ini juga telah digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh (Yanuaraisya, 2016). Namun demikian, terdapat perbedaan fokus penelitian. (Yanuaraisya, 2016) menggunakan metode tersebut untuk mengkaji tata kelola keuangan pemerintah daerah, sedangkan pada penelitian ini memakai pendekatan yang sejenis tetapi hanya berfokus pada pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda.

3.3.2 Karakteristik Pemerintah

Ukuran pemerintah, tingkat kemandirian, dan opini audit BPK merupakan karakteristik pemerintah pada penelitian ini. Ukuran pemerintah diukur dengan jumlah aset yang dimiliki pemda. Tingkat kemandirian diukur memakai PAD terhadap total pendapatan daerah. Sementara itu, opini audit BPK digunakan sebagai ukuran kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana opini yang lebih baik, seperti WTP mencerminkan tingkat kepatuhan dan transparansi yang lebih tinggi.

3.3.2.1 Ukuran Pemerintah (UP)

Ukuran pemerintah mencerminkan kecil besarnya pemerintah daerah yang dinilai melalui total aset yang tercantum dalam laporan keuangan. Total aset dipandang sebagai indikator yang mampu menggambarkan kapasitas ekonomi dan skala aktivitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik. Sejalan dengan penelitian (Adiputra et al., 2018), penelitian ini juga memakai total aset sebagai dasar pengukuran ukuran pemerintah.

$$UP = Ln (\text{Total aset pemda})$$

3.3.2.2 Tingkat Kemandirian (TK)

Tingkat kemandirian mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dan pengeluaran dari sumber pendapatan sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian pemda diprosikan menggunakan rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah. Kian tinggi tingkat kemandirian, kian rendah ketergantungan pemda terhadap dana transfer pusat untuk membiayai operasional dan pembangunan.

$$TK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3.3.2.3 Opini Audit BPK (Opini)

Opini audit BPK adalah salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi yang berlaku. Opini WTP bukan hanya menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara andal, tetapi juga memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda. Pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda merupakan pewujudan nyata dari transparansi. Sebaliknya, opini di bawah WTP dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan, yang berdampak pada rendahnya tingkat pengungkapan. Dengan demikian, penting untuk diteliti apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD melalui *website* resmi.

Sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh (Adiputra et al., 2018), pada penelitian ini variabel opini audit BPK diukur memakai skala dummy, yang mana skor diberikan sebesar 1 untuk opini WTP dan skor 0 diberikan untuk opini Non-WTP.

Opini = 1, jika memperoleh WTP
0, jika memperoleh opini non-WTP

3.4 Variabel Kontrol

3.4.1 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Tingkat pendidikan merupakan pendidikan yang sudah diikuti oleh kepala daerah (Pahlevi & Setiawan, 2017). Pengukuran tingkat pendidikan kepala daerah memakai skala ordinal didasarkan jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempuh, dengan kategori sebagai berikut:

Table 3.1
Indikator Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

No.	Indikator	Poin
1	Strata-2 serta Strata-2 ke atas	4
2	Strata-1	3
3	Diploma (D3/D4)	2
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2023), “statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menyajikan serta menggambarkan data yang telah diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa bertujuan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi”. Penelitian ini memakai analisis statistik deskriptif guna menggambarkan sebaran serta karakteristik data terkait ukuran pemerintah, tingkat kemandirian dan opini audit BPK selama periode 2023-2024. Deskripsi data ditunjukkan melalui nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi serta nilai rata-rata (*mean*) dari variabel yang diteliti.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

(Ghozali, 2021) menyatakan bahwa tahap pertama dalam studi multivariat apa pun adalah menguji normalitas data, terutama jika inferensi adalah hasil yang diinginkan. Residual akan independen dan terdistribusi secara teratur jika normalitas ada. Ini menyiratkan bahwa kesalahan, atau perbedaan antara skor yang diharapkan dan skor aktual, akan terdistribusi secara simetris di sekitar nilai means sama dengan nol.

Kemiringan (*skewness*) dan kurtosis adalah dua komponen utama yang menentukan normalitas data. Derajat simetri suatu distribusi berkaitan dengan kemiringannya. Jika nilai rata-rata suatu variabel tidak tepat berada di tengah distribusi, maka distribusi tersebut dianggap miring. Di sisi lain, kurtosis menggambarkan tinggi puncak distribusi. Nilai kurtosis dan kemiringan mendekati 0 untuk distribusi normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

“Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas” (Ghozali, 2021).

Terdapat beberapa metode yang bisa dipakai untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Salah satunya metodenya adalah dengan mengamati plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Indikasi heteroskedastisitas bisa diketahui melalui pola yang muncul di scatterplot antara ZPRED dan SRESID. Pada grafik tersebut, sumbu Y merepresentasikan nilai variabel dependen yang diprediksi, sedangkan sumbu X mengindikasikan residual (perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi) yang sudah distudentisasi.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2021) “Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol”. Untuk menguji keberadaan multikolinearitas pada model regresi adalah sebagaimana berikut:

- a. Meskipun nilai R^2 regresi cukup tinggi, sebagian besar faktor independen memiliki sedikit pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Analisis matriks korelasi antar variabel bebas. Korelasi yang sangat tinggi (umumnya $>0,90$) menjadi tanda keberadaan multikolonieritas. Namun, meskipun tidak ada korelasi tinggi, multikolonieritas tetap bisa ada yang disebabkan oleh penggabungan dua atau lebih variabel
- c. *Variance inflation factor* (VIF) dan nilai toleransi juga dapat digunakan untuk menguji multikolinearitas.
 - Toleransi mengukur seberapa besar fluktuasi variabel independen tidak bisa dijelaskan oleh variabel lain.
 - VIF yang tinggi berbanding terbalik dengan nilai toleransi yang rendah ($VIF = 1/\text{Toleransi}$).
 - Batas umum: Multikolinearitas ditunjukkan oleh toleransi $\leq 0,10$ atau VIF ≥ 10 .
 - Batas toleransi harus ditentukan oleh peneliti; misalnya toleransi 0,10 sesuai dengan tingkat kolonieritas 0,95.

3.5.3 Variabel Dummy pada Model Regresi

Dalam penelitian ini, variabel dummy digunakan untuk mengubah data kualitatif menjadi bentuk kuantitatif agar dapat dianalisis melalui regresi. Opini audit BPK yang bersifat kategorikal dikonversi menjadi variabel dummy dengan kode numerik. Pemberian kode dilakukan sebagai berikut:

- 1 = *Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)*
- 0 = *Opini non – WTP*

3.6 Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen pada variabel dependen menggunakan regresi berganda. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan pola korelasi antar variabel baik pengaruh tidak langsung maupun langsung. (Ghozali, 2021). Bentuk persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$IP = \alpha + \beta_1UP + \beta_2TK + \beta_3OPINI + \beta_4TKPD \varepsilon_t$$

Keterangan:

IP	: Indeks Pengungkapan
UP	: Ukuran Pemerintah
TK	: Tingkat Kemandirian
OPINI	: Opini Audit BPK
TKPD	: Tingkat Pendidikan Kepala Daerah
ε_t	: Error Term

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini memakai uji-t dengan kriteria berikut untuk pengambilan keputusan:

- H_a didukung jika nilai signifikansi kurang dari α (0,05). Ini menunjukkan bahwa variabel dependen secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen.
- H_a tidak didukung jika nilai signifikansi lebih besar dari α (0,05). Ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen.

Selain melalui uji t, pada penelitian ini pengujian hipotesis juga dilakukan melalui melihat koefisien regresi. Koefisien regresi dipakai untuk menjelaskan arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk antara

variabel independen dan dependen adalah searah, sedangkan koefisien yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah. Dengan demikian, pengujian hipotesis tidak hanya ditentukan oleh signifikansi statistik, tetapi juga oleh interpretasi nilai koefisien regresi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa temuan utama yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini secara menyeluruh.

Pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah Pulau Sumatera tidak terpengaruh oleh variabel ukuran pemerintah, menurut hasil pengujian menggunakan logaritma natural dari total aset sebagai proksi. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah Pulau Sumatera tidak selalu sesuai dengan ukuran aset mereka.

Hasil pengujian terhadap variabel tingkat kemandirian yang diproksikan dengan perbandingan PAD terhadap total pendapatan menemukan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda pulau Sumatera. Koefisien tingkat kemandirian bertanda positif, hal ini mengindikasikan hubungan yang searah antara Tingkat Kemandirian dan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda pulau Sumatera.

Hasil pengujian terhadap variabel opini audit BPK yang diukur dengan variabel dummy yang mana nilai 1 untuk opini WTP dan nilai 0 untuk opini selain WTP menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda pulau Sumatera. Temuan ini menunjukkan bahwa perolehan opini WTP mendorong pemerintah daerah di pulau Sumatera untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup sampel pada penelitian ini hanya mencakup pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatera.

Variabel independen yang dipakai pada penelitian ini masih terbatas pada ukuran pemerintah, tingkat kemandirian dan opini audit BPK. Padahal, masih terdapat berbagai variabel lain yang secara teoretis dan empiris diduga turut memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemda pulau Sumatera.

5.3 Saran

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan atau menggunakan variabel lain di luar model penelitian ini yang berpotensi memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemda, seperti tingkat ketergantungan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*.
- Chairani, A., Tertiarto, W., & Rela, S. (2021). Factors Affecting Disclosure Of Financial Statements On Local Government Websites In Indonesia. *Eurasia: Economics & Business*, 1(43), 1.
- Chen, T., Xu, M., Tu, J., Wang, H., & Niu, X. (2018). Relationship Between Omnibus And Post-Hoc Tests: An Investigation Of Performance Of The F Test In Anova. *Shanghai Archives Of Psychiatry*, 64.
- Dewi, S. A., & Purwanto, A. (2022). Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Lkpd, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 7.
- García-Sánchez, I.-M., Frías-Aceituno, J.-V., & Rodríguez-Domínguez, L. (2013). Determinants of corporate social disclosure in Spanish local governments. *Journal of Cleaner Production*, 64.
- Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality Test for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians. *International Journal of Endocrinology Metabolism*, 486.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indaryani, A. N., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Tingkat Kemandirian, Kesejahteraan Masyarakat dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan Tahun 2019-2020). *Jurnal Ekombis Review*, 89.
- International Budget Partnership. (2023). *Open Budget Survey 2023*: <https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2023/indonesia>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 5.

- Kurniawati, D., Sarwono, A., & Sunarti. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Provinsi Jawa Tengah 2015–2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 240.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites A quest of its determinant(s). *Asian Journal of Accounting Research*.
- Nugraha, F. S., Suhendro, S., & Tubarad, C. (2026). Local Government Integrity and Human Resource Competence in Enhancing Financial Reporting Quality: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 49.
- Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kepala Daerah Berdampak Terhadap. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 573.
- Perez, C. C., Hernandez, A., Bolivar, & Bolivar, M. (2005). Citizens' Access To On-Line Governmental Financial Information: Practices In The European Union Countries. *Government Information Quarterly*.
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 175.
- Pradana, A., Sunardi, & Fahmi, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Putra, A. A., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan Leverage Terhadap Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2025.
- Putra, N. P., Suhartini, D., & Dimayantisukiswo, W. (2023). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2018 - 2021. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2.
- Putri, D. A. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Umur Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah. 20.
- Rahayu, S., & Khasanah, F. (2022). Internet Financial Reporting: In the case of district and city governments in Central Java Province, Indonesia. *Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 1045.

- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. *In Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (Bicmst 2020)* (pp. 1-6). Atlantis Press.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Safitri, I. M. (2023). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus LKPD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020)*.
- Sari, N. M., & Mustanda, I. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 4763.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undp. (1997). *Governance for Sustainable Human Development* .
- Utomo, K. C., & Aryani, A. (2016). The Determinant Of Financial Information Disclosure On Indonesian Lgs Website. *Asia Pasific Fraud Journal*, 86.
- Wooldridge, J. M. (2009). *Introductory Econometrics A Modern Approach*. Mason, USA: South-Western Cengage Learning.
- Wulandari, S. W., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Internet Financial Reporting Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 217.
- Yanuaraisya, A. (2016). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Website Pemerintah*.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. (2020). Key elements of local government transparency in new public governance. *Problems and Perspectives in Management*, 101.